

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK  
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG  
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**  
*(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)*



Oleh :  
**AKMAL**  
2007 / 88777

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode September 2012**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK  
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG  
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**  
*(Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat)*

**Oleh :  
AKMAL  
2007 / 88777**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Maret 2013

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19710552 200003 2 001**

**Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**  
**NIP. 19771123 200312 1 003**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK  
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG  
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**  
(*Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat*)

**Akmal**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : [Achmale\\_fc@yahoo.com](mailto:Achmale_fc@yahoo.com)

**Abstract**

This study aimed to test and prove empirical evidence of: 1) the effect of council knowledges about budget with country finances supervision, 2) the effect of society participation on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision, 3) Effect of public's rules tranprance on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision. The type of this research is classified as causative research. The population in this study is the city's council in West Sumatera. The sample was selected by using total sampling method. The data was analyzed by using moderating regression analysis.

There are 3 hypothesis in this research: 1) The council knowledges about budget have a significant positive effect to the public's finances supervision, 2) The society participation have a significant positive effect on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision, 3) The public's rules tranprance have a significant positive effect on the relationship of council knowledges about budget with country finances supervision. The results of statistical test prove that: 1) The council knowledges about budget have a significant positive effect to the public's finances supervision. 2) The society participation does not support on the relationship of council knowledges about budget to the finance supervision. 3) The public's rules tranprance does not support on the relationship of council knowledges about budget with finance supervision.

This study suggested: 1) The country finances supervision to keep raise the council knowledge about budget and public's rules tranprance to reach the vision and mission of the council to show a good performance, job's division need to be watched, because with the budget invigilation from the council can raise up the council's knowledge about budget and public's rules tranprance. 2) For the next researchers who are interested in researching the same title should be adding other variables, such as organizational culture, motivation, and environmental uncertainty.

**Key words:** council knowledge about budget, country finances supervision, society participation, public rules tranprance

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, 3) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah DPRD kota yang di sumatera barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*. Analisis data menggunakan *moderating regression*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan, 3) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan.

Dalam penelitian ini disarankan agar pengawasan keuangan daerah untuk terus meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik agar tercapainya visi dan misi DPRD sehingga menunjukkan kinerja yang baik, pembagian tugas harus juga diperhatikan, karena dengan adanya pengawasan anggaran oleh anggota dewan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian agar bisa menemukan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

**Kata kunci:** Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik.

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran (Rosseptalia,2006:2).

Menurut Promono (2002) dalam Rima (2006) Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2002:126), proses perencanaan anggaran daerah pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut adalah (1) Masyarakat, (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah.

Menurut Werrimon (2007) pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pemahaman dan pengetahuan anggota dewan dalam memahami dan menyusun, serta mendeteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat diperlukan karena akan mempengaruhi anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dari hasil temuan terhadap penelitian terdahulu, terdapatnya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2007), Werimmon dkk (2007), Isma (2007), Rima (2006), hasilnya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) dalam Erlina (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini terlihat bertentangan dengan penelitian lainnya dimana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dalam penelitian ini pemakaian pendekatan kontigensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai factor moderating atau intervening yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Faktor kontigensi transparansi kebijakan publik dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Achmadi,dkk (200:11) menyatakan bahwa kontrol masyarakat yang kuat akan di sertai ruang partisipasi publik yang luas dapat menjaga proses penganggaran dan kebijakan menjadi lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran.

Kurangnya pengetahuan dewan untuk mengawasi keuangan daerah ini akan berdampak pada masyarakat dan hasil pengawasan yang kurang baik. Di DPRD kota Padang terdapat penyimpangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp 188 juta di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat. Dugaan penyimpangan dana tersebut di temukan oleh Pansus Komisi III tahun 2009 di Padang. Erison mengungkapkan, dugaan penyimpangan dana ini berasal dari dana APBD yang dialokasikan untuk pengadaan mobil operasional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, namun dalam realisasinya justru di alihkan untuk pengadaan mobil kantor instansi itu (Erison,2009). Dari kasus tersebut bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD masih belum optimal.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris : (a) Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, (b) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah, (c) Pengaruh transparansi kebijakan publik

terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Kegunaan dari penelitian ini adalah: (a) Untuk memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya. (b) Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan *good government* (pemerintah yang baik), dan dapat dijadikan acuan bagi partai politik dalam merekrut anggota DPRD serta pengembangan kader partai. (c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

## **2.TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pendekatan Kontijensi**

Ghozali (2002) menjelaskan bahwa faktor moderating yaitu faktor atau variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Sedangkan faktor intervening adalah faktor atau variabel yang dipengaruhi oleh suatu variabel dan mempengaruhi variabel lainnya.

### **Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2002:146), Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif.

#### **a.Pengawasan preventif**

Menurut Husein (2005:243), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan

sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan ditempuhnya prosedur-prosedur yang seharusnya dan yang telah ditetapkan berarti pengawasan preventif telah dilaksanakan.

#### **b.Pengawasan represif**

pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246). Pengawasan represif ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan APBD dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran**

Yudoyono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran Menurut Kaho (2005), dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang:

#### **a. Proses Penyusunan APBD, sabagai berikut:**

1. Pemda menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.
2. Penyampaian kebijakan umum APBD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan.
3. DPRD bersama Pemda membahas prioritas dan plafon sementara.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana dan anggaran SKPD.

5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
6. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun berikutnya.
  - b. Pelaksanaan dan Pelaporan APBD, sebagai berikut:
    1. SKPD membuat rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
    2. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan dari PPKD.
    3. Rancangan DPA-SKPD diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.
    4. PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda).
    5. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan oleh PPKD kepada Kepala SKPD, BPK paling lambat 7 hari setelah disahkan.
    6. DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Kepala SKPD.
    7. Laporan keuangan pelaksanaan APBD disusun oleh PPKD.
    8. Laporan keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggaran berakhir.
    9. BPK memeriksa laporan keuangan pelaksanaan APBD paling lambat 2 bulan setelah diterima dari Pemda.
    10. Apabila dalam waktu 2 bulan, BPK belum menyampaikan/mengeluarkan hasil pemeriksaan, Pemda boleh mengajukan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

### Partisipasi Masyarakat

Semenjak bergulirnya otonomi daerah, sistem anggaran yang digunakan adalah sistem

anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka akan membuka ruang yang luas bagi masyarakat luas bagi masyarakat (publik) berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan implementasi anggaran. Kontrol masyarakat yang kuat disertai ruang partisipasi publik yang luas dapat menjaga proses penganggaran dan kebijakan menjadi lebih bertanggungjawab dan tepat sasaran (achmadi dkk, 2005:11).

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Krina (2003) partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi perlu dipertimbangkan beberapa aspek seperti:

- a) Partisipasi melalui institusi konstitusional (*referendum, voting*) dan jaringan *civil society*.
- b) Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*.
- c) Faktor – faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetensi

### Transparansi Kebijakan Publik

Mengacu pada apa yang di sampaikan dalam UU No. 56 Tahun 2005 tersebut, tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, dalam rangka menuju pemerintahan yang baik.

Mardiasmo (2003) dalam Werimmon dkk Secara ringkas mengatakan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a) Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah
- b) Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Rima,2006):

- a) Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun
- b) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik.
- c) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
- d) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan.
- e) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

### **Penelitian yang Relevan**

Penelitian Simson (2007) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua yang menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah APBD dan partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Menurut penelitian Isma (2007) di Bengkulu meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil penelitian pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya., sedangkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Sopannah dan Mardiasmo, 2003) dan hasilnya

menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

### **Hubungan antar Variabel**

#### **1. Hubungan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Menurut Yudoyono (2003:63) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah kebijakan publik. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan, dengan adanya hak tersebut tentunya dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah apabila digunakan sesuai aturan, dengan demikian, hal ini mempertegas Pengetahuan dewan tentang anggaran mampu mengawasi kegunaan dalam menggunakan keuangan daerah (APBD).

#### **2. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Pengetahuan Anggota DPRD**

## **Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Rubin (1996) dalam Sopana dan Mardiasmo (2003), untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik di perlukan partisipasi kepada instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hak sebagai kedaulatan rakyat, dengan demikian adanya partisipasi masyarakat tentunya akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan, karena meningkatnya partisipasi aktif dari masyarakat, partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada para legislatif tentang adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para eksekutif terkait dengan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

### **3. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Diasumsikan semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian, adanya transparansi kebijakan publik tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Isma (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

## **Kerangka Konseptual**

Pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota DPRD dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparansi kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlihat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

## **Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

H<sub>2</sub>: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika partisipasi masyarakat tinggi.

H<sub>3</sub>: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauhmana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan hubungan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai variabel independen dengan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependennya.

#### Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan objek dalam penelitian (Arikunto, 2002). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD yang berada pada panitia anggaran pada seluruh kota di Sumatera Barat. Untuk sampelnya digunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan *total sampling*. Dipilihnya anggota dewan yang berada pada panitia anggaran dalam penelitian ini, dikarenakan panitia anggaran ini lebih mengetahui tentang anggaran daerah.

Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlah populasi kurang dari 100 subjek. Responden dalam penelitian ini adalah anggota dewan panitia anggaran pada Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok..

#### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara).

#### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dari penelitian ini, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden.

#### Variabel Penelitian

##### 1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Mundrajat, 2003). Pengamatan akan dapat mendeteksi atau menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (Y).

##### 2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya (Kuncoro, 2003). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran (X<sub>1</sub>).

##### 3. Variabel Pemoderasi (*Moderating variabel*)

Variabel pemoderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat (X<sub>2</sub>), dan Transparansi Kebijakan Publik (X<sub>3</sub>).

#### Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan 5 (lima) skala Likert. Untuk variabel bebas dan terikat yang berbentuk pernyataan positif, 5 skala Likert yang

digunakan adalah sangat setuju (SS) diberi skor 5 (lima), setuju (S) diberi skor 4 (empat), Kurang Setuju (KS) diberi skor 3 (tiga), tidak setuju (TS) diberi skor 2 (dua) dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 (satu)

## Uji Instrumen

### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Uji validitas berguna untuk menentukan seberapa cermat suatu alat melakukan fungsi ukurannya

### Uji Reliabilitas ( *Test of Reliability* )

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.

## Hasil Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan dan Keuangan Negara Dan Daerah dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka dapat dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $n = 30$  adalah 0.3061. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah semuanya diatas  $r_{tabel}$ . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah adalah valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas, suatu data dapat dikatakan reliabel yaitu apabila nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ . Dari hasil pengolahan data didapat nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ , sehingga semua item pernyataan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, partisipasi masyarakat,

transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian yang menggunakan metode regresi berganda. Uji regresi mempunyai asumsi-asumsi tertentu sehingga penerapan praktis model tersebut menurut pemakai untuk menguji asumsi-asumsi tersebut dalam konteks permasalahan yang ada. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

### 1. Uji Normalitas Residual

Menurut Ghazali (2007) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak menceng ke kiri atau ke kanan). Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2007), uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Jika  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0,1$  maka tidak terjadi multikolinieritas tapi jika  $VIF > 10$  dan  $tolerance < 0,1$  berarti terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2007), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* atas pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dalam uji ini, apabila hasilnya  $sig > 0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : (a) Verifikasi Data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden. (b) Menghitung Nilai Jawaban yang dilakukan dengan cara: Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan, Menghitung rata-rata skor item, Menghitung nilai rerata jawaban responden, Menghitung Nilai Tingkat Capai Responden (TCR) dari masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, Lalu nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- Interval jawaban responden 76-100% kategori jawaban baik.
- Interval jawaban responden 56-75% kategori jawaban cukup baik.
- Interval jawaban responden <56% kategori jawaban kurang baik.

### 2. Metode analisis

#### a. Adjusted Determinan ( $Adj R^2$ )

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square*-nya, sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan variabel moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen dengan menggunakan SPSS.

#### b. Persamaan Regresi

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 (X_1 \cdot X_2) + \beta_3 (X_1 \cdot X_3) + e$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

A = Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

$X_2$  = Partisipasi Masyarakat

$X_3$  = Transparansi Kebijakan Publik

$X_1 X_2$  = Interaksi antara  $X_1$  dan  $X_2$   
 $X_1 X_3$  = Interaksi antara  $X_1$  dan  $X_3$   
e = Standar Error.

#### c. Uji F (F-test)

Untuk uji model dilakukan melalui uji ANOVA atau *F test*. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2007).

#### c. Uji t (t-test)

Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t untuk menguji apakah secara terpisah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara baik. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi berganda pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kesimpulan atas pengujian hipotesis didasarkan pada tingkat signifikan dan koefisiennya yaitu sebagai berikut :

- Jika tingkat signifikan  $< \alpha$  (0,05) dan koefisien regresi ( ) negatif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak  $H_0$
- Jika tingkat signifikan  $< \alpha$  (0,05) dan koefisien regresi ( ) positif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- Jika tingkat signifikan  $> \alpha$  (0,05) dan koefisien regresi ( ) negatif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

## Definisi Operasional

### 1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pemahaman dan kemampuan anggota dewan di berapa kota di Sumatera Barat dalam memahami dan menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan, dan kebocoran anggaran.

### 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses anggaran. Seluruh masyarakat berhak untuk menyalurkan aspirasinya baik secara langsung maupun secara lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi masyarakat secara aktif diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya prinsip partisipasi ini memungkinkan masyarakat juga dapat melakukan kontrol terhadap anggaran.

### 3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik adalah adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memudahkan anggota dewan di Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

### 4. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan di Sumatera Barat yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Semua anggota dewan harus mampu menggunakan keuangan APBD dengan semestinya supaya tidak akan ada penyalahgunaan keuangan daerah dan dapat berjalan dengan semestinya.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah DPRD kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto sehingga jumlah responden adalah 160 responden, namun kuesioner yang dapat diolah hanya 120 kuisisioner.

### Uji Validitas dan Reliabelitas

#### 1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $N = 120$ , adalah 0,136. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$  semuanya di atas  $r_{tabel}$ . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$  adalah valid..

#### 2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas intrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. (Sekaran, 2006).

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal..

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya  $\text{sig} > 0,05$  atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini:

Dari tampilan *output SPSS model summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,108. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel

pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah 10,8%, sedangkan 89,2% di tentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

## 2. Persamaan Regresi atau Model Analisis

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square*-nya, sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan variabel moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen dengan menggunakan SPSS.

Berdasarkan tabel analisis regresi dapat menghasilkan model analisis sebagai berikut:

$$Y = 58,238 + 0,413X_1 + 0,204[(X_1 \cdot X_2)] + 0,224[(X_1 \cdot X_3)] + e$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

A = Konstanta.

$a_1, a_2, a_3, a_4$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

$X_2$  = Partisipasi Masyarakat

$X_3$  = Transparansi Kebijakan Publik

$X_1 X_2$  = Interaksi antara  $X_1$  dan  $X_2$

$X_1 X_3$  = Interaksi antara  $X_1$  dan  $X_3$

e = Standar Error.

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Dari persamaan di atas didapatkan nilai konstanta sebesar 58.238 yang berarti bahwa tanpa adanya pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik pada kinerja organisasi, maka nilai variabel pengawasan keuangan daerah berada pada 58.238.
- Koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0,431 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,431 satuan. Nilai koefisien dari variabel  $X_1$  bernilai positif 0,431.

c. Koefisien Partisipasi Masyarakat sebesar 0,204 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan variabel Partisipasi Masyarakat satu satuan akan mengakibatkan peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,204 satuan. Nilai koefisien dari variabel  $X_2$  bernilai positif 0,204.

d. Koefisien transparansi kebijakan publik sebesar 0.224 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan variabel transparansi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 0.224 satuan. Nilai koefisien dari variabel  $X_3$  bernilai positif 0,224.

## 3. Uji F (F-Test)

Hasil pengolahan data SPSS pada uji F untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat serta untuk menguji apakah model yang digunakan sudah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan derajat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan itu dapat dilihat bahwa signifikansi adalah 0,001 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

## 4. Uji hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi t hitung yang dihasilkan kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti variabel *Independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* dan untuk melihat arah apakah positif atau negatif dilihat dari koefisien . Berdasarkan tabel di dibawah, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

### a. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Nilai t tabel pada  $\alpha = 0,05$  adalah 1,432. dari Tabel 21 dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran adalah  $0,000 < 0,05$  dan koefisiennya positif yaitu sebesar 4,155 atau  $t_{hitung}$  untuk variable Pengetahuan Dewan tentang Anggaran adalah

4,155 > 1,432 sehingga hipotesis 1 pada penelitian ini **diterima**.

**b. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.**

Nilai t tabel pada  $\alpha = 0,05$  adalah 1,432. Dari Tabel 21 dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel moderat adalah  $0,684 > 0,05$  dan koefisiennya positif yaitu sebesar 0,204 atau  $t_{hitung}$  untuk moderat  $0,408 < 1,432$  sehingga hipotesis 2 pada penelitian ini **ditolak**

**c. Pengaruh transparansi kebijakan public terhadap hubungan Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.**

Nilai t tabel pada  $\alpha = 0,05$  adalah 1,432. Dari Tabel 21 dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel moderat adalah  $0,716 > 0,05$  dan koefisiennya positif yaitu sebesar ,224 atau  $t_{hitung}$  untuk moderat  $0,365 < 1,432$  sehingga hipotesis 3 pada penelitian ini **ditolak**

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah**

Dari hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang ditunjukkan dari perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  ( $4,155 > 1,432$ ) serta nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu 0,000. Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini diterima yang artinya penelitian ini dapat menemukan bukti bahwa Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dapat meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ari (2009) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap pengawasan keuangan daerah, karena semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin baik pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran yang mana tingkat

capaian responden tertinggi yaitu sebesar 90,67% dengan pernyataan pemda menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan, tingkat capaian responden dalam penelitian ini dikategorikan baik dengan rerata sebesar 87,99%..

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang proses penyusunan anggaran sudah bagus, karna setiap masing-masing DPRD kota di Sumatera Barat sudah melaksanakan APBD dengan semestinya.

### **2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah**

Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi signifikansi untuk variabel moderat adalah  $0,684 > 0,05$  dan koefisiennya positif yaitu sebesar 0,204 atau  $t_{hitung}$  untuk moderat  $0,408 < 1,432$ . Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak yang artinya penelitian ini tidak dapat menemukan bukti bahwa Partisipasi Masyarakat terhadap Pengetahuan Dewan tentang anggaran dapat meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah. Dimana maknanya bahwa partisipasi masyarakat tidak bisa dinyatakan sebagai variabel pemoderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat terhadap Pengetahuan Dewan tentang Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah DPRD kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di DPRD Kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Isma (2007) di Bengkulu meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik

sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil penelitian pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya, sedangkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian sejalan dengan penelitian dilakukan oleh (Sopannah dan Mardiasmo, 2003) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, dikarenakan sebelum APBD dipublikasikan, anggota DPRD telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang anggaran dalam pengawasan keuangan daerah.

### **3. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah**

Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah ditunjukkan

dengan nilai signifikansi untuk variabel moderat adalah  $0,716 > 0,05$  dan koefisiennya positif yaitu sebesar  $,224$  atau  $t_{hitung}$  untuk moderat  $0,365 < 1,432$ . Dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak yang artinya penelitian ini tidak dapat menemukan bukti bahwa Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengetahuan Dewan tentang anggaran dapat meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah. Dimana maknanya bahwa transparansi kebijakan publik tidak bisa dinyatakan sebagai variabel pemoderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengetahuan Dewan tentang Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah DPRD kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua ( $H_3$ ) disimpulkan bahwa Transparansi Kebijakan Publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di DPRD Kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu  $0,000$  (besar dari  $= 0,05$ ). Ini berarti bahwa hubungan antara transparansi kebijakan publik tidak searah dengan pengawasan keuangan daerah di DPRD kota di Sumatera Barat, Semakin baik transparansi kebijakan publik maka belum tentu pengawasan keuangan daerah di DPRD kota di Sumatera Barat akan semakin baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Werismon, Ghazali dan Nazir, M (2007) bahwa tidak terdapat pengaruh antara transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2002 : 105) yang mengatakan transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat, dapat disimpulkan transparansi terfokus pada kemudahan masyarakat dalam mengakses kebijakan anggaran yang menyangkut kepentingan publik sehingga tidak akan

meningkatkan atau mengurangi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah, karena menurut Kaho (2005), dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD. Dalam hal ini sebelum APBD dipublikasikan, pemerintah daerah harus memberitahu terlebih dahulu kepada anggota dewan mengenai segala kebijakan APBD untuk disetujui, sehingga walaupun banyaknya akses mengenai APBD dalam artian transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak akan terpengaruh dalam pengawasan keuangan daerah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, dikarenakan sebelum APBD dipublikasikan, anggota DPRD telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang anggaran dalam pengawasan keuangan daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah semakin baik.
- b. partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
- c. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

- d. Partisipasi

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota DPRD untuk dapat meningkatkan pengetahuannya tentang anggaran dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar tentang anggaran agar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat ditingkatkan, sehingga tidak terjadinya lagi pemborosan dan kebocoran anggaran.
2. Partisipasi masyarakat sangat perlu ditingkatkan, sehingga nantinya pelaksanaan APBD dapat lebih terkontrol dan terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan.
3. Transparansi kebijakan publik dapat ditingkatkan lagi, tidak hanya sekedar pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran saja, namun juga adanya peningkatan penilaian dan hasil serta manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
4. Dalam hal instrumen penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi instrumen dalam penelitian ini.
5. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, serta memperluas cakupan wilayah atau sampel ke tingkat provinsi dan kabupaten. Sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.

### DAFTAR PUSTAKA

Ade, Muhammad. 1993. *Akuntansi Pemerintah*.

Jakarta : FE UI

Saputra, Ari (2009). "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Anggaran terhadap

- Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan publik, Akuntabilitas Publik.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Erison. 2009. “ Mencermati Penggunaan APBD : Kasus APBD Kota Padang “. Melalui (www.Antaraneews.com) [21/4/2010]
- Erma, Noviaangsih. (2010). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).”
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Helmayunita, Nayang (2008).“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating.”
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung : CV. Utomo.
- Isma, Coryanata. (2007). “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. *Jurnal SNA*.
- Kaho, dkk. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia.2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. Bandung. Citra Umbara.Manajerial “ *Journal Bisnis Strategi* ,vol 10 Th VII, pp 48 – 61.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No.58 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Rima, Rosseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Sopannah. 2003. “ Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. *Jurnal SNA VI*. Hlm. 1160-1174.
- Werimon, Ghozali dan Nazir,M.2007.” Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”.*Jurnal SNA X*. Hlm 1-22.

Yesi, dkk. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi.

Yudoyono, Bambang.2002. *Otonomi Daerah*.Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.



12.	Menurut anggota dewan jika ada kejanggalan dengan LPJ APBD hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran.					
13.	Anggota dewan menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan.					
14.	Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					
15.	DPRD melakukan evaluasi dan pembahasan atas laporan pertanggung jawaban yang diterima dari pemerintah.					
16.	Pengawasan fungsional dimulai dari proses penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD.					
17.	DPRD terlibat dalam setiap tahap proses pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pengawasan fungsional.					
18.	Anggota dewan mengetahui aturan-aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran sehingga memudahkan fungsi pengawasan dari DPRD.					
19.	Anggota dewan akan mengusulkan untuk meminta pihak eksternal yang indenpenden untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban.					

## B. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran

### 1. Pemahaman anggota dewan terhadap proses penyusunan APBD

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pemda menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan.					
2.	DPRD bersama Pemda membahas plafon dan prioritas APBD sementara.					
3.	Kepala SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.					
4.	Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran dilaporkan kepada PPKD.					
5.	PPKD menyusun Ranperda tentang APBD tahun berikutnya.					
6.	Ranperda disahkan menjadi Perda paling lambat tanggal 31 Desember.					

### 2. Pemahaman Anggota Dewan Tentang Pelaksanaan Dan Pelaporan APBD

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	SKPD menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat					

	Daerah (DPA-SKPD).					
2.	Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan dari PPKD.					
3.	Rancangan DPA-SKPD diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.					
4.	PPKD mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda).					
5.	DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD dan BPK paling lambat 7 hari setelah disahkan.					
6.	DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh kepala SKPD.					
7.	PPKD menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD.					
8.	Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah APBD berakhir.					

### C. Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD tidak melibatkan masyarakat					
2.	Prioritas dan rencana APBD tidak mempertimbangkan usulan dan kritikan masyarakat					
3.	Dalam penyusunan APBD mempertimbangkan usulan dan kritikan masyarakat					
4.	Dalam Advokasi APBD tidak melibatkan masyarakat					
5.	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota DPRD dengan pemda berkaitan dengan rancangan APBD selalu melibatkan masyarakat					
6.	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD					
7.	Apabila terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD, tidak perlu disosialisasikan kepada masyarakat					
8.	Tersedianya laporan keuangan oleh pemerintah daerah					
9.	Masyarakat tidak dapat mengakses informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah dengan bebas.					

#### D. Transparansi Kebijakan Publik

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi.					
2.	Selama ini masyarakat mudah mengakses dokumen publik.					
3.	Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat waktu.					
4.	Kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara atau usulan rakyat.					
5.	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi anggota dewan dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.					
6.	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan dilakukan melalui media massa, maupun media komunikasi personal.					
7.	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan dibuat dan mekanisme pengeluaran rakyat.					

## LAMPIRAN

### 1. UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

a. Y

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.841	19

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	79.6750	31.667	.536	.829
VAR00002	79.7917	31.023	.536	.828
VAR00003	79.5833	32.648	.402	.835
VAR00004	79.7000	31.775	.520	.830
VAR00005	79.6333	31.243	.500	.830
VAR00006	79.6917	31.862	.473	.832
VAR00007	79.7500	31.836	.486	.831
VAR00008	79.7083	32.023	.400	.835
VAR00009	79.7750	32.462	.354	.837
VAR00010	79.7667	32.584	.307	.840
VAR00011	79.6917	32.484	.342	.838
VAR00012	79.7500	32.239	.363	.837
VAR00013	79.7083	32.376	.420	.834
VAR00014	79.7000	32.061	.417	.834
VAR00015	79.8167	32.134	.327	.839
VAR00016	79.7083	31.351	.527	.829
VAR00017	79.7667	31.676	.415	.834
VAR00018	79.6833	32.033	.432	.833
VAR00019	79.6500	31.490	.422	.834

b. X1

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.870	14

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	57.0583	24.896	.385	.868
VAR00002	57.1583	24.655	.405	.867
VAR00003	57.1500	23.759	.544	.861
VAR00004	57.1917	24.324	.459	.865
VAR00005	57.1917	23.232	.517	.863
VAR00006	57.2250	23.218	.525	.862
VAR00007	57.1333	23.142	.642	.856
VAR00008	57.2083	22.939	.694	.853
VAR00009	57.2000	22.884	.601	.857
VAR00010	57.2000	23.271	.549	.860
VAR00011	57.2833	24.356	.433	.866
VAR00012	57.2417	23.630	.538	.861
VAR00013	57.2417	23.277	.557	.860
VAR00014	57.2083	23.444	.549	.860

c. X2

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	9

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	35.4417	9.492	.562	.779
VAR00002	35.5333	9.965	.372	.803
VAR00003	35.5083	9.294	.630	.771
VAR00004	35.5750	9.423	.517	.784
VAR00005	35.5000	9.546	.515	.785
VAR00006	35.5083	9.529	.462	.792
VAR00007	35.4167	10.363	.294	.811
VAR00008	35.5000	9.227	.629	.770
VAR00009	35.5500	9.376	.540	.781

d. X3

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	26.5583	7.778	.460	.793
VAR00002	26.6500	6.918	.613	.766
VAR00003	26.6583	7.269	.505	.787
VAR00004	26.5750	7.238	.576	.774
VAR00005	26.5083	7.227	.529	.782
VAR00006	26.5333	7.511	.499	.787
VAR00007	26.6167	7.011	.591	.770

2. Uji Normalitas Residual

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.53838278
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.037
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.456
Asymp. Sig. (2-tailed)		.985
a. Test distribution is Normal.		

3. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	x1	.987	1.013
	Moderat_1	.983	1.017
	Moderat_2	.971	1.030

a. Dependent Variable: Y

4. Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.473	1.439		1.023	.310
	x1	-.010	.023	-.054	-.419	.677
	Moderat_1	.128	.118	.140	1.078	.286
	Moderat_2	.114	.149	.100	.762	.449

a. Dependent Variable: AbsUt

5. Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.361 <sup>a</sup>	.131	.108	5.610

a. Predictors: (Constant), Moderat\_2, x1, Moderat\_1

1. Model Analisis

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.238	6.272		9.286	.000
	x1	.413	.099	.362	4.155	.000
	Moderat_1	.204	.500	.036	.408	.684
	Moderat_2	.224	.614	.032	.365	.716

a. Dependent Variable: Y

2. Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	548.423	3	182.808	5.810	.001 <sup>a</sup>
	Residual	3650.168	116	31.467		
	Total	4198.592	119			

a. Predictors: (Constant), Moderat\_2, x1, Moderat\_1

b. Dependent Variable: Y